LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2024

🔏 JL. R. TUMENGGUNG SURYO NO. 32 - 34, MALANG

6 0341485231. 485232

₽ 0341400528

Telah disesuaikan dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Trikarya Waranugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-OJK) PT BPR TRIKARYA WARANUGRAHA



Syariah.

- 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
- 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga lasa Keuangan
- 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
- 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
- 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-OJK)





- 32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
- 36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat peningkatkan nilai perusahaan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR TRIKARYA WARANUGRAHA

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Trikarya Waranugraha telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Trikarya Waranugraha menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Trikarya Waranugraha.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

	1	
Alamat	:	JL. R. TUMENGGUNG SURYO NO. 32 - 34, MALANG
Nomor Telepon	:	0341485231. 485232
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Trikarya Waranugrah melakukan pelaksanaan tata kelola yang umum cukup baik. Hal ini tercerm pemenuhan yang cukup memadai atas prir kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pela prinsip tata kelola, secara umum keletersebut cukup signifikan dan memperhatian yang cukup dari manajemen BPR.	

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaa	ın Tugas d	an Tanggung Jawab Anggota Direksi			
1	Nama	: CAH	YO PURNOMO			
	Jabatan	: 0100	- Direktur Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur- direktur lain dan staf yang terkait.			
		- Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan				
		 Membuat strategi dan kegiatan kebijak untuk mencapai target yang tela direncanakan serta tetap berpegang deng perundang-undangan dan peraturan ya berlaku. 				
		-	Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan.			
		 Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungar kerjasama dengan pihak-pihak terkai khususnya perbankan dan instansi-instans baik pemerintah maupun swasta. 				
		-	Mewakili Bank di dalam maupun di luar			



- pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan Bank.
- Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan.
- Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk perfomance bawahan dan Bank.
- Memberikan motivasi kepada seluruh staf /karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
- Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL dan aspek lainnya.
- Bertanggungjawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan.
- Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan.
- Wajib mengikuti perkembangan peraturan peraturan dan perundang - undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian.
- Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Membuat dan menetapkan kebijakan kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang - Undang atau peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf/karyawan melalui penilaian.
- Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti :
- Menyetujui / menolak setiap transaksi, pengajuan kredit , pengambilan barang jaminan, dll.
- Memeriksa, menyetujui / menolak dan menandatangani laporan keuangan, dll.

No	Pelaksanaa	ın Tugas	dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: YAI	NI ATI	
	Jabatan	: 020	01 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.	
		- Menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan		
		-	Bertanggungjawab penuh kepada Direktur Utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko perusahaan.	
		- Mengadakan, menjalin dan menjaga hu kerja sama dengan pihak-pihak khususnya perbankan dan instansi -		



baik pemerintah maupun swasta.

- Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional.
- Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundnag-undangan dan peraturan yang berlaku.
- Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur Utama, Kepala Bagian yang terkait dan staf.
- Wajib mengikuti perkembangan peraturanperaturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian.
- Memantau dan menjaga agar kondisi bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya.
- Membuat kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undangundang atau peraturan yang berlaku.
- Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank, kepatuhan dan menajemen risiko Bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- Memeriksa, menyetujui/menolak dan menandatangani laporan keuangan, dll
- Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan - tunjagan lainnya bagi staf .

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

	0 00	_			
No	Pelaksanaar	n Tug	gas da	n Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	:	DWI	TJAHJONO	
	Jabatan	: Komisaris Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-	Mengkoreksi dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Bank tahunan yang diajukan	



oleh Direksi.

- Memberikan pengarahan kepada Direksi dalam rangka pembuatan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, peraturan -peraturan dan perundangundangan yang berlaku baik perbankan maupun peraturan peraturan pemerintah lainnya.
- Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan yang telah ditaetapkan.
- Mengevaluasi dan mereview hasil dari Rencana Kerja Direksi setiap semester.
- Melakukan penilaian atas performance atau prestasi kerja Direksi
- Melakukan kontrol secara menyeluruh atas jalannya kinerja perusahaan
- Melaksanakan rapat rutin Komisaris setiap triwulan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Menyusun Laporan Dewan Komisaris setiap semester kepada OJK dan pihak yang terkait diantaranya laporan perkembangan BPR terhadap pihak ekstern maupun laporan hasil evaluasi terhadap pihak manajemen BPR.
- Melaksanakan pertemuan Dewan Komisaris minimal 3 bulan sekali.
- Wajib menjaga dan merawat semua inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan penilaian dan keputusan atas permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi.
- Sebagai wakil dari pemegang saham pada RUPS untuk menetapakan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi.
- Dapat mengusulkan dalam RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi.
- Memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dipandang menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris				
1	Nama	: DAANCE YOSEF WETIK			
	Jabatan	: Komisaris			
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Mengkoreksi dan memberikan persetujua Rencana Bisnis Bank tahunan yang diajuka oleh Direksi.			
		- Memberikan pengarahan kepada Direk dalam rangka pembuatan kebijakan ya tertuang dalam Rencana Bisnis Bar peraturan -peraturan dan perundan	ng าk,		



- undangan yang berlaku baik perbankan maupun peraturan - peraturan pemerintah lainnya.
- Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Mengevaluasi dan mereview hasil dari Rencana Kerja Direksi setiap semester.
- Melakukan penilaian atas performance atau prestasi kerja Direksi
- Melakukan kontrol secara menyeluruh atas jalannya kinerja perusahaan
- Melaksanakan rapat rutin Komisaris setiap triwulan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Menyusun Laporan Dewan Komisaris setiap semester kepada OJK dan pihak yang terkait diantaranya laporan perkembangan BPR terhadap pihak ekstern maupun laporan hasil evaluasi terhadap pihak manajemen BPR.
- Melaksanakan pertemuan Dewan Komisaris minimal 3 bulan sekali.
- Wajib menjaga dan merawat semua inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan penilaian dan keputusan atas permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi.
- Sebagai wakil dari pemegang saham pada RUPS untuk menetapakan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi.
- Dapat mengusulkan dalam RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi.
- Memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dipandang menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja da	an Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:_
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominas	i
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	: -
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

			Komite					
No	Nama	Keahlian	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	Pihak Independen
-	-	-	-	-	-	-	-	-



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	CAHYO PURNOMO	-	-	-	-
2	YANI ATI	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DWI TJAHJONO	-	-	-	-
2	DAANCE YOSEF WETIK	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan				
No		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1	CAHYO PURNOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
2	YANI ATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada		



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No		Hubungan Keuangan				
	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1	DWI TJAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
2	DAANCE YOSEF WETIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada		

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No		Hubungan Keluarga			
	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	CAHYO PURNOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	YANI ATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No		Hubungan Keluarga				
	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1	DWI TJAHJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
2	DAANCE YOSEF WETIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada		

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)		Direksi	Dewan Komisaris		
No		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	
1	Gaji	2	107.400.000	2	221.070.000	
2	Tunjangan	2	504.343.660	2	40.472.027	
3	Tantiem	2	0	2	0	
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0	
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0	
	Total Renumerasi		611.743.660		261.542.027	
		Jenis	Fasilitas Lain			
1	Perumahan	-	-	-	-	
2	Transportasi	-	-	-	-	
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-	
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-	
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-	



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,63
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,29



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-4-26	2	CBS cloud telah digunakan untuk pengiriman laporan bulana dan SLIK, penggunaan/implementasi CBS Cloud masih dual control dan dual entry dengan CBS lama. B. NPL mengalami penurunan secara signifikan menjadi 14,97 % mengalami penurunan sebesar 8.29 % dikarenakan terdapat penurunan tunggakan debitur inti BPR secara signifikan yaitu nasabah an. Andrie Ariestianto dan Teguh Baroto. Dewan Komisaris meminta Dewan direksi agar memantau mengenai penerapan APUPPT, Keuangan Berkelanjjutan dan SAK EP.
2	2024-7-12	2	CBS cloud telah digunakan untuk pengiriman laporan bulana dan SLIK, penggunaan/implementasi CBS Cloud masih dual control dan dual entry dengan CBS lama. Dewan Komisaris BPR meminta kepada Dewan Direksi untuk memantau proses penerapan Core Banking System BPR . Untuk NPL akhir triwulan II, semester I th 2024 sebesar 19.23 %, mengalami penurunan sebesar 5.38 % jika dibandingkan dengan posisi yang sama akhir triwulan II, semester I th 2023 sebesar 24.61 %. Dewan konisaris meminta dewan direksi agar melakukan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur kolektibilitas macet yang sudah jatuh tempo kredit maupun yang belum jatuh tempo kredit, diharapkan BPR segera melakukan upaya-upaya litigasi dan atau non litigasi. Dewan Direksi agar memantau persiapan penerapan APUPPT serta pelaksanaan program kerja Implementasi penerapan SAK EP.
3	2024-10-15	2	CBS cloud telah digunakan untuk pengiriman laporan bulanan dan SLIK, penggunaan/implementasi CBS Cloud masih dual control dan dual entry dengan CBS lama. Dewan Komisaris agar tetap memantau perkembangan implementasi CBS Cloud. Untuk NPL akhir triwulan III, semester II Tahun 2024 sebesar 18,42 %, naik sebesar 3.45 % jika dibandingkan dengan posisi yang sama akhir triwulan III, semester II th 2023 sebesar 14.97 %. 7. Direksi harus bisa menjaga kualitas aktiva produktif dan senantiasa meningkatkan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah sehingga kualitas aktiva produktif tetap terjaga dibawah 5%. Dewan Direksi agar memantau persiapan penerapan SAK EP dan pelaksanaan program kerja Implementasi penerapan SAK EP. Dewan Direksi agar memantau POJK terbaru yaitu POJK No 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan yang telah ditetapkan pada tanggal 23 juli 2024. Direksi agar memastikan bahwa BPR telah /akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam POJK tersebut.
4	2025-1-16	2	CBS cloud telah digunakan untuk pengiriman laporan bulanan dan SLIK, penggunaan/implementasi CBS Cloud masih dual control dan dual entry dengan CBS lama. Dewan Komisaris agar tetap memantau perkembangan implementasi CBS Cloud. Posisi NPL per 31 Desember 2024 adalah 18,34 %. wan konisaris meminta dewan direksi agar melakukan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur kolektibilitas macet yang sudah jatuh tempo kredit maupun yang belum jatuh tempo kredit, diharapkan BPR segera melakukan upaya-upaya litigasi dan atau non litigasi. Pencapaian laba per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.771.921.839,-, atau 77,96 % dari target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menghimbau Direksi agar mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan dari yang pencapaian di Triwulan IV Semester II. Dewan Direksi agar memantau persiapan penerapan SAK EP dan memantau POJK terbaru yaitu POJK No 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan keuangan Bank yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024. Direksi agar memastikan bahwa BPR telah/akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam POJK tersebut.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

		Frekuensi	Tingkat	
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fisik	Telekonferensi	Kehadiran (dalam %)
1	DWI TJAHJONO	4	0	100,00%
2	DAANCE YOSEF WETIK	4	0	100,00%



K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Anggota Direksi		Anggota Kom	n Dewan isaris	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		=		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Damas a labor Hulum	Jumlah (satuan)			
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-		
Dalam proses penyelesaian	2	-		
Total	2	-		

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Transaksi	(Jutaan Rupiah)	
1	Ma Yan	Pemegang Saham	Yani Ati	Direktur	Sewa Gedung Kantor Pusat	570	Masa sewa 25 Mei 2022 s.d 25 Mei 2025
2	LILIS HARTATI	Direktur PT Eddy Muljono Group	Yani Ati	Direktur	Service charge gedung kantor pusat	95	Biaya dibebankan sesuai dengan jangka waktu sewa
3	VINDY LESTARI	Pemegang Saham	Yani Ati	Direktur	Sewa gedung Kantor Kas Sukun	58	masa sewa 2 April 2023 s.d 2 April 2025
4	CHAYO, S.Kom	Direktur Utama PT. Andalan Tata Manajemen	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pengadaan dan jasa pemeliharaan perangkat lunak Core Banking System	60	
5	VIVI DALIMARTHA HERLAMBANG	Direktur CV Anugerah Giant Abadi	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pemasaran Produk Asuransi Kerugian	117	Nominal adalah total pembayaran asuransi dalam 1 tahun
6	SINDUKARTO	Direktur CV Elang Mahkota Gemilang Learning Center	CAHYO PURNOMO	Direktur Utama	Pelatihan dan workshop	300	Nominal adalah total pembayaran pelatihan dalam 1 tahun
7	KUNTJONO, S.H., M.H, C.L.A	Direktur CV Kresna Yurisdika	CAHYO PURNOMO	Drektur Utama	Pelayanan / jasa di bidang hukum	20	Jangka waktu 3 Mei 2024 s.d 2 Mei 2025



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Trikarya Waranugraha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Trikarya Waranugraha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Trikarya Waranugraha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Trikarya Waranugraha, Terima Kasih.

MALANG, 3 Februari 2025 Persetujuan Pengurus PT BPR Trikarya Waranugraha

DWI TJAHJONO Komisaris Utama CAHYO PURNOMO Direktur Utama